**TABBAKA: KONFLIK DAN INTEGRASI**

**DI KERAJAAN ARUNGKEKE ABAD XVII**

**TABBAKA: THE CONFLICT AND INTEGRATION**

**OF THE ARUNGKEKE XVII CENTURY*\****

**SUBAEDAH**

**ABSTRACT:** The research aims: (1) to reveal the background and the formation process of Arungkeke Kingdom, (2) to explain the conflict and socio-cultural and political integration in Arungkeke in XVII Century, (3) to explain the impact of the conflict and integration in socio-cultural life in former Arungkeke Kingdom to date.

The research is categorized as history research that employs history research method. History method employs four stages, namely (l) Heuristic, (2) History critics, (3) Interpretation, and (4) Historiography. Research data were obtained from the relevant researches, informants, published books aligned with the context of the research.

The results of the research reveal that (l) the background and the formation process of Arungkeke Kingdom also known as one of the kingdom that stands alone without associated under the rule of another kingdom, (2) conflict and socio-cultural and political integration in Arungkeke Kingdom in XVII Century, Arungkeke as a village had long been present along with the socio-cultural system that is therein and undergo the process to maintain the existence of particular social system, (3) the impact of conflict and integration in socio-cultural and political life in former Arungkeke Kingdom to date, Arungkeke as one of the areas of administrative government and has the potential for life in variety of activities. It is very necessary debate to criticize the policy and practice of the socio-cultural and political life society.

**ABSTRAK:** Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Mengungkapkan latar belakang dan proses terbentuknya Kerajaan Arungkeke, (2) Menjelaskan konflik dan integrasi sosial budaya dan politik di Kerajaan Arungkeke abad XVII, (3) Menjelaskan dampak konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial budaya di eks wilayah Kerajaan Arungkeke dewasa ini.

 Penelitian ini kategorikan sebagai peneliti sejarah yang tentunya juga menggunakan metode penelitian sejarah. Metode sejarah menggunakan empat tahapan yaitu (1) Heuristik (2) Kritik Sejarah (3) Interprestasi (4) Hitsorigrafi. Data dari penelitian ini diperoleh dari penelitian yang relevan, informan, buku-buku terbitan yang sesuai dengan konteks penelitian ini.

 Hasil Penelitan menunjukkan bahwa: (1) Latar belakang dan proses terbentuknya Kerajaan Arungkeke, Arungkeke juga dikenal sebagai salah satu kerajaan yang berdiri sendiri tanpa terkait dibawah kekuasaan kerajaan lain. (2) konflik dan integrasi sosial budaya dan politik di Kerajaan Arungkeke abad XVII, Arungkeke sebagai desa yang telah lama hadir bersama dengan sistem sosial budaya yang ada didalammya serta mengalami proses untuk mempertahannkan eksistensi pada sistem sosial tertentu. (3) dampak konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial budaya dan politik di eks wilayah Kerajaan Arungkeke dewasa ini, Arungkeke sebagai salah satu desa dalam wilayah pemerintahan administratif dan memiliki potensi kehidupan dalam berbagai aktivitas perdebatan itu sangat diperlukan dalam mengkritik kebijakan maupun praktek sosial budaya dan politik dalam kehidupan masyarakat.

1. **Pendahuluan**

Proses dinamika yang terjadi pada setiap daerah terus mengalami perubahan tersendiri dalam kurun waktu berdasarkan wilayahnya yang sangat beragam. Kabupaten Jeneponto atau lazim disebut Turatea merupakan salah satu Kabupaten di propinsi Sulawesi Selatan , serta terdapat beberapa kerajaan yang pernah berdiri pada wilayah ini. Pada abad XVII Turatea merupakan kerajaan konfederasi yang di dalamnya terdapat tiga kerajaan besar yakni Kerajaan Binamu, Bangkala dan Laikang. kerajaan yang tergabung dalam konfederasi tersebut memiliki sistem dan struktur pemerintahannya masing-masing. Akan tetapi, Kerajaan Binamu memiliki perbedaan di antara kerajaan konfederasi lainnya. Kerajaan Binamu mampu menghimpun enam panji kerajaan lokal di dalam pemerintahannya, yakni Kerajaan Garassi, Bangkala, Binamu, Arungkeke, Tarowang dan Sapanang serta 16 kampung atau domain (Caldwell dan Bouges, 2004).

Munculnya persekutuan kerajaan tersebut memberikan warna tersendiri serta memberikan pengaruh terhadap kerajaan lain yang terdapat di sekitarnya. Meskipun demikian, hal tersebut tidaklah menjadi penghalang munculnya kerajaan-kerajaan lain yang memiliki status pemerintahan yang berbeda. Salah satu kerajaan lokal yang dimaksud yakni Kerajaan Arungkeke. Kerajaan tersebut memiliki status pemerintahan yang independen atau berdiri sendiri serta memiliki wilayah pemerintahan tersendiri. Pada awal berdirinya Kerajaan ini diberi nama Arungkeke dan tidak pernah mengalami proses perubahan. Sehingga penamaan kerajaan tersebut diperkirakan mendapat pengaruh kebudayaan Bugis. Hal tersebut sesuai dengan adanya kata “Arung” yang terdapat dalam penamaan Kerajaan Arungkeke (CaldwellW. Bougas, 2004: 20-21).

Kerajaan Arungkeke merupakan salah satu kerajaan di daerah Turatea yang mampu menunjukkan eksistensinya pada abad XVII. Hal ini didukung oleh beberapa faktor, yang memungkinkan kerajaan ini dapat disegani. Di samping itu dari catatan silsilah raja-raja Arungkeke, kebangsawan serta kekerabatan raja-rajanya memiliki hubungan dengan kerajaan di sekitar wilayah Turatea, bahkan memiliki hubungan kekerabatan dengan kerajaan-kerajaan di Turatea. Diantaranya dapat dilihat dari silsilah Arungkeke, dimana terdapat integrasi kebangsawanannya dengan Tarowang dan Boengoeng, Karaeng Tarowang bernama Patta Dulung Aroeng Areojoeng yang menikah dengan Maryam Daeng Rawang Karaeng Rawang dan melahirkan lima orang anak (Hadrawi, 2008:68-69). Pertalian keluarga tersebut memberikan pengaruh terhadap perkembangan Kerajaan Arungkeke.

Adanya kemandirian tersebut menjadikan Kerajaan Arungkeke memiliki sejarah dan kebudayaan yang mampu diwariskan, salah satunya ialah Kompleks *Tabbaka.* Kompleks tersebut, dalam perkembangannya mengalami peralihan fungsi sebagai kompleks pemakaman para raja-raja dan keluarganya, para pemuka agama dan para pejabat kerajaan termasuk para adipati (penguasa kawasan), keluarga atau kerabat pembesar kerajaan. Akan tetapi, dalam kompleks tersebut juga terdapat makam hamba sahaya tetapi hamba sahaya yang memiliki jasa-jasa kepada raja atau mereka yang dianggap memiliki kedekatan dengan pembesar kerajaan.

Sebagai salah satu peninggalan sejarah yang memiliki peranan penting pada zaman kerajaan, kompleks tersebut dijadikan cagar budaya oleh pemerintah Kabupaten Jeneponto. Meskipun demikian, kondisi tempat bersejarah tersebut tidak mendapat perhatian serius dari pemerintah setempat. Sehingga benda-benda peninggalan kerajaan tersebut hanyalah meninggalkan tumpukan bebatuan yang tidak terawat.

Kondisi tersebut merupakan daya tarik tersendiri bagi penulis untuk menelusuri lebih jauh mengenai bagaimana awal mula berdirinya Kerajaan Arungkeke serta perkembangannya, serta bagaimana konflik yang terjadi pada kerajaan Arungkeke dan proses integrasi. Selain itu, hal terpenting yakni dampak yang ditimbulkan konflik dan proses yang terjadi pada Kerajaan Arungkeke.

Kondisi tersebut didukung oleh sulitnya ditemukan kajian yang membahas tentang Kerajaan Arungkeke, termasuk kajian mengenai *Tabbaka*. Penulisan sejarah Indonesia khususnya penulisan sejarah lokal masih sangat penting dilakukan agar setiap generasi mengetahui identitas dirinya dan daerahnya. Seperti halnya dengan penelitian ini, berusaha untuk mengungkapkan sejarah integrasi awal Kerajaan Arungkeke, serta perkembangannya. Kurangnya literatur yang membahas mengenai Kerajaan Arungkeke atau pun *tabbaka* merupakan tantangan tersendiri bagi penulis untuk berusah mengumpulkan berbagai informasi.

1. **Tinjauan Pustaka**
	1. **Teori Konflik**

Konflik bisa terjadi pada setiap lapisan masyarakat dan golongan maupun dalam negara. Beberapa faktor penyebab konflik adalah adanya saling bergantungan. Saling bergantungan dalam pekerjaan terjadi jika dua kelompok organisasi yaang saling membutuhkan satu sam lain guna menyelasaikan tugas. Konflik juga terjadi karena perbedaan tujuan diantara satu bagian denga bagian yang lain yg tidak sepaham. Konflik juga muncul jika terjadi perbedaan persepsi atau pendapat. Dalam hal menghadapi suatu masalah, perbedaan persepsi yang ditimbulkan inilah yang menyebabkan munculnya konflik (Sopiah, 2008:37).

Menurut Dahrendorf berkaitan dengan masalah konflik bahwa tidak selalu pemilik sarana-sarana yang dianggap ideal bertugas sebagai pengontrol. Lebih lanjut, Jonathan Turner merumuskan teori konflik dalam tiga pandangannya yaitu:

1. Tidak ada defenisi yang jelas tentang teori konflik sehingga tidakdapat dibedakan karena penggunaan istilah
2. Teori konflik mengambang karena analisisnya tidak di jelaskan
3. Teori konflik sulit terlepas dari teori fungsional karena merupakan reaksi dari teori struktur fungsional.

Berbeda dengan Turner, Luis A. Coser mengatakan bahwa konflik dapat menempatkan dan menjaga garis batas antara dua atau lebih kelompok. Konflik dengan kelompok lain dapat memperkuat kembali identitas kelompok dan melindunginya agar tidak lebur ke dalam dunia sosial sekelilingnya. Coser melihat katup penyelamat berfungsi sebagai jalan keluar yang meredakan perumusan, yang tanpa itu hubungan-hubungan di antara pihak-pihak yang bertentangan akan semakin menajam. Katup penyelamat (*savety-value*) ialah salah satu mekanisme khusus yang dapat dipakai untuk mempertahankan kelompok dari kemungkinan konflik sosial.

* 1. **Teori Integrasi**

Integrasi berasal dari bahasa inggris *"integration"* yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Integrasi sosial dimaknai sebagai proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memilki keserasian fungsi (Muhsin, 2015: 6-15) yang dikutif pada (<http://meyla-isoda.blogspot.com>/makalah-integrasi-sosial.html). Sementara definisi lain mengenai integrasi adalah suatu keadaan di mana kelompok-kelompok etnik beradaptasi dan bersikap komformitas terhadap kebudayaan mayoritas masyarakat, namun masih tetap mempertahankan kebudayaan mereka masing-masing. Dan integrasi ini memiliki dua pengertian, yaitu :

1. Pengendalian terhadap konflik dan penyimpangan sosial dalam suatu sistem sosial tertentu.
2. Membuat suatu keseluruhan dan menyatukan unsur-unsur tertentu.

Di samping itu disebutkan bahwa integrasi adalah pembauran sesuatu yang tertentu hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Istilah pembauran tersebut mengandung arti masuk ke dalam, menyesuikan, menyatu, atau melebur sehingga menjadi satu. Sementara menurut Banton bahwa integrasi sebagai suatu pola hubungan yang mengakui adanya perbedaan ras dalam masyarakat, tetapi tidak memberikan makna penting pada perbedaan ras tersebut (http://anandalangkai.blogspot.com/2015/02/makalah-sosiologi-integrasi-sosial.html)

1. **METODE PENELITIAN**
	* 1. **Jenis dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian sejarah, sehingga pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan sejarah. Pendekatan ini dilatarbelakangi oleh bentuk datanya dari tema penelitian ini, yakni “Tabbaka: Konflik dan Integrasi Awal Kerajaan Arungkeke Jeneponto pada Abad XVII”. Tabbaka sendiri secara realita pada masa itu merupakan tempat pelantikan para raja Arungkeke. Sebelum dijadikan sebagai tempat pelantikan raja-raja Arungkeke, tempat ini adalah yang sangat bersejarah dan saat meninggalkan jejak sejarah. Baik secara arkeologis maupun aspek-aspek lainnya.

Penelitian ini menggunakan analisis deskristif dalam menjelaskan setiap alur peristiwa. Sumber atau data yang ditemukan dianalisis lewat kritik sumber, kemudian digambarkan dengan konkrit sesuai dengan fakta sejarah. Untuk menyesuaikan dengan ciri khas dari ilmu sejarah, maka untuk mengeksplanasi peristiwa harus secara kronologis dan kontinuitas, beriringan dengan temporal waktu yang ditetapkan dan spasial atau wilayah yang diteliti.

Penelitian sejarah ini prosesnya berfokus pada Tabbaka sebagai tempat pelantikan para raja Arungkeke***.*** Hal ini berarti bahwa penelitian ini melakukan analisis terhadap keadaan dan perkembangan serta pengalaman masa lalu Kerajaan Arungkeke***.*** Oleh karena itu, perlu untuk mempertimbangkan secara hati-hati dan teliti terutama bukti dan validitas sumber sejarah dan menginterpretasi dari keterangan yang diperoleh. Dengan demikian, bentuk penyusunan yang dilakukan dengan menggunakan metode historis atau metode sejarah.

Metode sejarah adalah seperangakat asas dan kaidah-kaidah sistematis yand diubah untuk membantu secara efektif dalam mengumpulkan sumber-sumber sejarah. Sumber sejarah tersebut dinilai secara kritis dan dapat menyajikan suatu sintesis dari hasil yang pada umunya berbentuk tulisan atau historiografi. Pendapat itu di perkuat oleh (Gottschalk (1985 :96) yang menyatakan bahwa metode sejarah adalah suatu proses untuk menganalisa peninggalan masa lalu yang dapat dikonstruksi secara imajinatif berdasarkan data-data yang diperoleh. Hasil rekontruksi secara imajinatif akan diperoleh gambaran tentang kehidupan masa lampau yang sering disebut historiografi.

 Sejarah sebagai bagian dari ilmu-ilmu sosial yang mengkaji tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah sosial dan mengkaji peristiwa yang terjadi pada masa lampau, haruslah memiliki metode tersendiri yang dalam Ilmu Sejarah disebut metode *historis* (metode sejarah) yang meninjau suatu masalah berdasarkan perspektif sejarah. Metode inilah yang digunakan dalam penelitian karya ini yang berjudul ”Tabbaka: Konflik dan Integrasi Awal Kerajaan Arungkeke Kabupaten Jeneponto Abad XVII”. Adapun metode sejarah itu menurut Nugroho Notosusanto dan Kuntowijoyo, yaitu sebagai berikut :

1. *Heuristik,* yaitu proses pengumpulan atau menghimpun jejak-jejak sejarah atau peristiwa masa lampau.
2. *Krititik sejarah,* yaitu menyelidiki apakah sumber-sumber sejarah atau jejak-jejak masa lampau itu bisa dimanfaatkan dalam penelitian atau tidak, baik menyangkut bentuknya maupun yang menyangkut isinya kandungannya.
3. Interpretasi, yaitu penafsiran terhadap sumber-sumber yang dikritik sebelumnya dengan menempatkan makna yang saling berhubungan dari fakta-fakta yang telah diperoleh dan dikritik tadi.
4. Penyajian sejarah, yaitu proses pengungkapan analisis dalam bentuk cerita yang bermuatan fakta-fakta yang telah diinterpretasi. Atau dengan kata lain penyajian atau menyampaikan sintesa yang diperoleh dalam bentuk kisah sejarah (Nugroho Notosusanto, 1978: 17).

Prosedur kerja yang dikemukakan tersebut di atas, dalam pelaksanaannya harus sistematis, sesuai dengan urutannya. Maksudnya proses heuristik harus mendahului kritik sumber karena tidak ada sumber yang dikritik kalau tidak ada sumber atau jejak-jejak sejarah. Demikian juga interpretasi dilakukan setelah melalui tahap penilaian atau kritik sumber, begitu pula penyajian dalam bentuk narasi atau cerita setelah dilakukan interpretasi.

1. **PEMBAHASAN**
	1. **Tabbaka dan Awal Terbentuknya Kerajaan Arungkeke**

Arungkeke adalah satu kerajaan yang dianggap kecil dan memiliki pengaruh besar di kerajaan sekitarnya. Proses terbentuknya kerajaan ini tidak jauh berbeda dengan kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan pada umumnya. Di mana konstelasi politik kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan pada masa lampau selalu punya kecenderungan untuk melakukan konsolidasi atau menyelesaikan masalah lewat pihak ketiga dengan apa yang disebut *Tu Manurung* (Ahimsa Putra, 1988:43-48)*.*

Sebagaimana halnya kerajaan lain yang ada di Sulawesi Selatan, Kerajaan Arungkeke juga bermula dari munculnya Tu Manurung dengan sosok wanita cantik yang dipercaya berasal dari kayangan. Tumanurung ini diberi nama Toalu Daeng Tabba, turun di Arungkeke, tepatnya di atas batu, di bawah pohon asam, di ayun oleh pengawal dan budak yang menyertainya. Konon, ia berasal dari emas karena semua alat-alat yang dipakainya terbuat dari emas, termasuk baju, mahkota, lesung, alu, perhiasan dan benda-benda lain yang ia bawa serta. Saat kemunculannya yang tiba-tiba itu, ia membunyikan *lesung* dengan *alu* di bawah pohon asam, diiringi suara *ganrang bulo* (gendang bambu) dan alat musik lainnya (Wawancara Dengan Hj. Mari, 16 Oktober 2016).

Tu Manurung atau sosok wanita cantik itu ketika ditanya oleh perwakilan-perwakilan masyarakat yang ada di Arungkeke tentang asal usulnya, Tu Manurung menjawab dengan hanya menyebut bahwa ia juga tidak tahu, bisa saja berasal semua arah mata angin tanpa menyebut satu wilayah atau daerah. Oleh karena tidak diketahui asal usulnya, maka semua perwakilan menyebutnya Tu Manurung, kemudian diberi gelar Toalu Daeng Tabba. Sementara pemberian nama gelaran “Toalu Daeng Tabba” karena kemunculan dan keberadaannya memakai simbol “Alu dan Lesung”. Sementara awalan To sebelum kata Alu menunjuk kepada orang, jadi toalu berarti orang Alu (bukan berasal dari daerah Alu) tetapi alu yang dipakai menumbuk padi di lesung. Sedangkan kata “daeng” dan kata “tabba” memiliki makna yang berbeda. Kata daeng dalam masyarakat Makassar dan bahkan dalam sejarah Sulawesi Selatan termasuk suku Bugis Makassar. Beberapa sumber menyebut bahwa kata daeng itu adalah gelar keningratan atau kebangsawanan tinggi Bugis Makassar, di samping gelar bangsawan lainnya, sedangkan tabba adalah wilayah tempat turun Tu Manurung (Wawancara Dengan Hj. Mari, 16 Oktober 2016).

Arungkeke merupakan kerajaan ini sangat diperhitungkan atas kebesarannya dan hubungan dagangnya dengan dunia luar. Khususnya di wilayah Turatea dan bahkan secara umum di Sulawesi Selatan. Arungkeke banyak dikenal melakukan perhubungan dengan wilayah kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan. Kerajaan Arungkeke sebagai kerajaan lokal memiliki wilayah kekuasaan dengan meliputi Arungkeke sendiri, Tamanroya, Punagaya, Petang, Pallengu, Boronglamu, Alla-alla, Pattiroang, Bonttorappo, Palajau, Bulo-bulo, Arungkeke Palantikan, Bungeng dan lain-lain. Kerajaan ini berdiri sekitar abad XVII, dan diperkirakan mendapat pengaruh Bugis yang nampak pada kata “Arung” dalam kata Arungkeke (CaldwellW. Bougas, 2004: 20-21) setelah perang Makassar.

Silsilah raja Kerajaan Arungkeke juga menyebutkan tentang kehadiran bangsawan orang Bone yang sengaja meninggalkan Kerajaan Bone untuk menghindari perang saudara antara Kerajaan Bone dengan Kerajaan Gowa. Bangsawan dari Kerajaan Bone ini bernama Arung Mutara yang pergi meninggalkan Bone dan menetap di Kerajaan Arungkeke. Kemudian beliau menikahi keturunan Tu Manurunga di Tabba Arungkeke yang bernama Karaeng Intang. Setelah berhasil mempersunting Karaeng Intang, tidak lama waktu berselang, beliau dinobatkan menjadi raja Kerajaan Arungkeke yang pertama kali dilantik di Tabbaka. Setelah itu, jabatan raja-raja berikutnya di Kerajaan Arungkeke adalah keturunan beliau.

Demikian juga penetapan tempat awal Arungkeke sering terjadi perbedaan pendapat dari dua tempat yang kita kenal sekarang. Apakah Arungkeke awal adalah Arungkeke yang kita kenal sebagai Arungkeke Tamanroya sekarang dekat Pallengu. Yang dalam hal ini sebagai wilayah Desa Arungkeke sekaligus menjadi ibu kota Kecamatan Arungkeke. Kemudian pendapat lain, apakah Arungkeke awal yang kita kenal adalah Arungkeke Pallantikan dan sekarang menjadi Desa Arungkeke Pallantikan. Dengan adanya pembagian desa antara Desa Arungkeke dengan Desa Arungkeke Pallantikan menunjukkan adanya pengertian dan pemahaman baru tentang di mana tempat Kerajaan Arungkeke awal. Kenyataan ini bisa ditelusuri berdasarkan fakta-fakta kelampauan Arungkeke sebagai tempat dan nama kerajaan adalah fakta-fakta berupa benda dan fakta-fakta sosial di antara dua tempat tersebut di atas.

Fakta benda yang dimaksud adalah sebuah batu besar yang dipercayai dan diyakini sebagai tempat pelantikan raja-raja Kerajaan Arungkeke yang terpilih. Tempat keberadaan batu yang dimaksud, sekarang berada di Desa Arungkeke Pallantikan. Kata ”pallantikan” yang berarti tempat pelantikan raja-raja Arungkeke, hal ini mengindikasikan bahwa Arungkeke Pallantikan adalah Tabbaka dulu. Tapi baik Arungkeke Pallantikan maupun Arungkeke Tamanroya adalah wilayah Kerajaan Arungkeke. Jadi Arungkeke Pallantikan adalah tempat pelantikan raja-raja, sedangkan Arungkeke Tamanroya adalah tempat istana Kerajaan Arungkeke.

Peristiwa Tabbaka adalah peristiwa munculnya Tu Manurung pertama kali di wilayah yang dikenal Tabbaka. Pemberian nama Tabbaka itu sebagai wilayah karena dilatarbelakangi oleh peristiwa *tabba* (perang). Sedang kata tabba dalam beberapa pendapat dan sumber menyebutkan bahwa tabba secara harfiah dalam bahasa Makassar berarti perang. Tabba atau perang adalah kebiasaan para pengembala diselah-selah kesibukannya mengembala ternaknya. Namun sepanjang tanah lapang itu, tumbuh juga pohon-pohon sebagai tempat berteduh para pengembala dan ternaknya. Oleh karena tempat itu sering dipergunakan sebagai tempat tabba (perang/saling melempar) maka tempat itu diabadikan menjadi wilayah yang disebut Tabbaka, artinya tempat melakukan permainan tabbaka yang berarti saling lempar melempar (Wawancara Dengan Hj. Mari, 16 Oktober 2016).

Tabbaka merupakan tempat atau lokasi yang ada di sekitar tempat datangnya Tu Manurung yang berada dalam wilayah *Kekaraengan* Arungkeke. Kemudian dalam perkembangannya Tabbaka berubah menjadi pemakaman raja-raja dan keluarga bangsawan kerajaan. Sementara Tabbaka sendiri diabadikan sebagai lokasi atau tempat pelantikan raja-raja Kerajaan Arungkeke. Sebab di tempat atau di lokasi itu adalah tempat di mana Tu Manurung pertama kali muncul sehingga diabadikan secara khusus untuk membedakan dengan tempat lain. Sebagai penghormatan kepada Tu Manurung, maka tempat atau lokasi itu diabadikan menjadi tempat pelantikan raja-raja Arungkeke sampai berakhirnya masa kerajaan. Sehingga setiap kali mengadakan *pallantikang karaeng* (pelantikan raja)*,* selalu dilakukan di bawah pohon asam sambil diayun, kemudian memperdengarkan suara tumbukan *lesung* dan *alu* (*melakukan paddeko*), dan suara *ganrang bulo*, serta alat musik lainnya yang berusia ratusan tahun. Alat musik ini dikenal dengan nama *Ganrang Talluna* *Arungkeke* (Wawancara dengan S. Karaeng Tika, 12 Oktober 2016).

Memasuki akhir abad ke-XVII, Arungkeke mengalami perubahan status sebagai kerajaan yang bernaung di bawah Kerajaan Binamu, sebagai domain atau daerah istimewa. Pada saat itu, Kerajaan Arungkeke tetap eksis dan indevenden dalam urusan internal kerajaannya. Walaupun pada saat itu, Kerajaan Arungkeke tidak bersedia ikut atau tunduk, atau mau bekerja sama dengan Kerajaan Binamu seperti yang dikemukakan oleh karim (Wawancara dengan Karim) bahwa pada waktu ada rencana perubahan untuk menjadikan Kerajaan Binamu sebagai kerajaan besar. pada rencana itu, ada beberapa kerajaan yang ada di Turatea mau disatukan dengan Kerajaan Binamu dan salah satu diantaranya adalah Kerajaan Arungkeke.

Sebagaimana diuraikan di atas bahwa *Tabbaka* secara harfiah dapat diartikan sebagai berperang tetapi dalam sejarah Kerajaaan Arungkeke *Tabbaka* adalah tempat turunnya pertama kali Tu Manurung yang beralaskan batu besar. Dan sebagai penghormatan kepada Tu Manurung, tempat itu diabadikan sebagai tempat raja-raja Arungkeke dilantik di atas batu besar, dan di bawah pohon asam, disampin makam Karaeng (raja) Arungkeke Arung Mutara Daeng Tabba bersama permaisurinya Karaeng Intang. Raja pertama yang dilantik di *Tabbaka* adalah Arung Mutara setelah dilantik menjadi raja Arungkeke dan setelah menikah dengan anak Karaeng Baine bernama Karaeng Intang.

Arung Mutara adalah bangsawan tinggi di Kerajaan Bone yang meninggalkan keluarga besarnya di Bone untuk menghindari perang saudara dengan Kerajaan Gowa. Sehingga beliau meninggalkan Bone menuju Arungkeke dengan membawa pelayan, prajurit, dan harta kekeyaannya. Arung Mutara diberi gelar Daeng Tabba Karaeng Arungkeke sesuai dengan nama tempat pelantikan di *Tabbaka* oleh rakyat kerajaan setempat dan diikuti oleh beberapa raja kerajaan kecil di Arungkeke lainnya. Arung Mutara Daeng Tabba Karaeng Arungkeke bersama permaisuri Karaeng Intang setelah wafat, beliau berdua dimakamkan di Tabbaka dekat tempat pelantikan raja-raja Arungkeke (Wawancara dengan Jupel Makam Tabbaka, Sunardi, 17 Oktober 2016)

Pada perkembangan selanjutnya, *Tabbaka* melatarbelakangi pemberian nama Desa Arungkeke Pallantikan sebagai tempat pelantikan raja-raja Arungkeke. Pada saat pembentukan desa, Tabbaka menjadi bagian wilayah Desa Tamanroya tetapi sekarang dikenal Desa Bungeng Kecamatan Batang (Camat Batang 2002-2005). Sementara Tabbaka dan sekitarnya berdiri sendiri dengan nama Desa Arungkeke Pallantikan. Terbentuknya Desa Arungkeke Pallantikan sebagai salah satu alasan untuk tidak memisahkan diri dari Kerajaan Arungkeke pada masa lampau.

Kerajaan Binamu sebelum Perang Makassar pada pertengahan abad XVII merupakan daerah bawahan Kerajaan Gowa. Posisi ini sebagai hasil ekspansi Kerajaan Gowa ke daerah-daerah sekitarnya sejak masa pemerintahan Raja Gowa IX Tumapa’risi Kallonna. Namun pra dan setelah Perang Makassar, Turatea dimasukkan dalam kategori kelompok Bugis bersama dengan Bone dan Soppeng. Pembentukan kelompok etnis ini diduga dibentuk dan dibangun oleh Spelmam sebagai penguasa perwakilan VOC Belanda. Pembentukan kelompok Bugis dan Makassar oleh Belanda ini adalah untuk memenuhi niat *devide impera* Belanda terhadap kawasan Sulawesi. Menurut catatan dan keterangan dari Edward L Poelinggomang bahwa Turatea sebagai Bugis tidak bertahan lama setelah Arung Palakka tidak mampu mempengaruhi secara utuh Turatea.

Perubahan-perubahan dalam sistem pemerintahan kerajaan terjadi sejak Belanda menguasai Sulawesi Selatan pada umumnya. Pada masa Kolonial Belanda inilah sering terjadi perubahan dalam politik pemerintahan. Hal ini terjadi sejak zaman lampau bagi kerajaan yang dikuasai langsung seperti perubahan-perubahan status daerah-daerah di Kerajaan Gowa. Perubahan status Kerajaan Gowa dapat terlihat pada saat kekalahan kerajaan Gowa oleh VOC, yaitu sekitar tahun 1667. Bersamaan dengan itu Turatea berada di bawah penguasaan Belanda sebagai penjajah. Masuknya penjajahan Belanda di Kerajaan Gowa secara umum, termasuk Kerajaan Binamu dan Arungkeke sebagai salah satu daerah kekuasaannya. Maka status daerah inipun berubah bersamaan dengan perubahan-perubahan status daerah-daerah lainnya di Kerajaan Gowa dan bawahannya. Sehingga pada saat itu Binamu yang membawahi Arungkeke berubah menjadi *Onder Afdeeling* Binamu.

* 1. **Konflik dan Integrasi Sosial Budaya dan Politik di Kerajaan Arungkeke Abad XVII**

Masyarakat dalam kondisi tertentu dapat merupakan sistem sosial, jika di dalamnya didapati bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berhubungan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada satu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian lainnya. Sehingga dengan demikian sebagai anggota masyarakat yang menginginkan hidup dalam suasanan keharmonisan, maka masing-masing harus bersedia memberi fungsi secara timbal-balik dan konstan berkualitas. Arungkeke sebagai desa yang telah lama hadir bersama dengan sistem sosial budaya yang ada di dalamnya juga telah mengalami proses untuk mempertahankan eksistensi pada sistem sosial tertentu. Tetapi juga telah berproses dalam perubahan yang hampir mereka tidak sadari oleh pendukungnya.

Sehubungan dengan kehidupan sosial budaya masyarakat di Arungkeke yang sekarang menjadi Kecamatan Arungkeke, maka dalam hal ini kita akan melihat pada beberapa segi sosial budaya. Aspek-aspek sosial budaya masyarakat yang akan kita kemukakan. Aspek-aspek yang dimaksud, antara lain menyangkut adat istiadat masyarakat Arungkeke. Termasuk hubungan antara seseorang dengan orang lain dalam kaitannya denga pemilikan tanah, agama dan keyakinan masyarakat, strata sosial masyarakatnya serta tingkat pendidikan masyarakat Arungkeke.

Setiap masyarakat khususnya masyarakat tradisional yang ada di Indonesia mengenal adat istiadat yang selalu ditaati oleh anggota masyarakatnya. Adat istiadat sebagai aturan yang tidak tertulis yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Bahkan telah menjadi suatu hukum yang disebut dengan hukum adat. Hal ini dilakukan karena adat istiadat yang sering mewarnai kehidupan masyarakat. Terkadang pula mempengaruhi berbagai aspek-aspek dan pranata-pranata sosial masyarakat yang ada di dalamnya. Tetapi adat istiadat itu menjadi wadah untuk menampilkan dan menghadirkan perilaku sosial dalam mempertahankan eksistensi mereka. Eksistensi ini terutama ditujukan kepada warga masyarakat setempat. Ditujukan pada penganut dan pendukung adat yang hadir pada saat ritual itu dilaksanakan dalam masyarakat setempat.

Walaupun nilai-nilai budaya berfungsi sebagai pedoman hidup manusia dalam masyarakat, tetapi sebagai konsep, suatu nilai budaya itu bersifat sangat umum, mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, dan biasanya sulit diterangkan secara rasional dan nyata. Namun justru karena sifatnya yang umum, luas dan tidak konkret itu, maka nilai-nilai budaya itu tidak tenggelam dengan zaman. Tetapi nilai-nilai dari suatu kebudayaan itu berada dalam daerah emosional dari alam jiwa para individu sebagai warga bagian dari kebudayaan tersebut. Namun harus diakui bahwa nilai-nilai memiliki kekurangan. Sehingga efek lain dari nilai-nilai abstrak itu, apa lagi dengan kurangnya kontrol yang tegas sebagai sebagai bentuk dan wujud kelemahannya.

Kelemahan itu terjadi karena tidak memiliki lembaga kontrol dalam masyarakat, dan kalaupun lembaga adat dijadikan lembaga kontrol, tetapi lembaga ini tidak mampu menjangkau semua elemen masyarakat. Walaupun anggota masyarakat itu sendiri sesungguhnya adalah bagian dari kontrol sosial dalam masyarakat. Dari pemahaman itulah, maka konsep-konsep yang masuk dalam kategori adat istiadat yang ada di daerah ini dianggap perlu disampaikan untuk memahami lebih jauh hubungan-hubungan yang terjadi dalam masyarakat secara luas. Hal itu bisa kita pada persoalan perkawinan secara adat, dan persoalan stratifikasi sosial.

Adat perkawinan dalam masyarakat di Jeneponto, termasuk masyarakat di Arungkeke, sejak masa lampau tidak jauh berbeda dengan sistem adat perkawinan yang berlaku di daerah lainnya di Sulawesi Selatan. Yaitu masyarakat yang didominasi oleh suku Bugis, Makassar, Mandar dan Toraja. Namun dalam prakteknya atau di dalam pelaksanaannya ada bagian-bagian yang sengaja diadakan, dibentuk dan dibangun berdasarkan syarat-syarat keluarga atau syarat-syarat guru atau penasehat mempelai. Guru atau penasehat mempelai yang dalam istilah setempat disebut *Anrong Bunting.* Walaupun demikian tetap banyak anggota masyarakat mempertahankan adat perkawinan itu berdasarkan sistem tradisionalnya yang telah lama dikenal dan telah turun temurun. Bentuk perkawinan (Husain Saidong, 2001: 17) yang sampai sekarang tetap merupakan bentuk perkawinan yang baik.

Bukan hanya persolan adat perkawinan yang mengalami perubahan pada satu sisi dan mempertahankan eksistensinya pada sisi lain, sebut saja persolan adat istiadat kematian. Memperlakukan orang meninggal, juga mengalami pergeseran jika dibandingkan pada masa lampau di Arungkeke. Dalam masyarakat Arungkeke pada masa lampau telah mengenal adat kematian atau dalam istilah setempat disebut *pattumateang* (Husain Saidong, 2001: 18)*.*  Adat kematian atau *pattumateang* merupakan proses perlakuan terhadap orang yang telah meninggal dunia, dan perlakuan tersebut telah dilakukan secara turun temurun sehingga menjadi adat kebiasaan masyarakat setempat. Pelaksanaan atau penyelenggaraan jenazah di Jeneponto secara umun dan Arungkeke khususnya telah ada sejak dahulu (zaman kerajaan). *Pattumateang* mengenal beberapa tahap perlakuan mayat seperti proses pengurusan awal jenazah, proses memandikan, proses mengkafani, proses menshalatkan, mempersiapkan usungan, proses penguburan dan apa yang disebut *attumate* (Husain Saidong, 2001: 18)*.*

Tahap-tahap tersebut mengisyaratkan keterlibatan orang dalam proses *pattumateang* karena orang yang telah meninggal dunia hanyalah perpindahan tempat dari alam dunia ke alam kubur. Sehingga sang mayat harus diperlakukan dengan adat yang baik agar roh sang mayat tidak bergentayangan mengganggu manusia. Secara sosial, perlakuan orang mati juga mencerminkan nilai dan status sosial orang yang telah meninggal dunia. Sehingga keluarga yang ditinggalkan wajib menunaikannya karena dianggap aib dan gensi dalam masyarakat. Dalam masyarakat sering ada kepercayaan bahwa orang mati baru dianggap betul-betul pergi setelah empat puluh hari berada dalam kuburan. Sehingga sering mengganggu manusia jika kematiannya tidak diperlakukan dengan baik sesuai dengan adat istiadat yang berlangsung secara turun temurun.

Pelaksanaan adat semacam ini sampai pada tahun 1960-an dan tahun 1970-an masih sangat kental walaupun ada perubahan namun tidak bersifat mendasar dan mencolok. Memasuki tahun 1980-an sampai sekarang juga mengalami perubahan, utamanya menyangkut pelaksanaannya serta status sosial si mayat. Misalnya bahwa saat sekarang ini pembedaan golongan masyarakat sudah mulai berkurang dalam memperlakukan si mayat. Menurut pengamatan, hal ini disebabkan oleh perubahan sistem sosial yang mengarah pada persamaan hak yang hanya dibedakan oleh tingkat ketakwaan, pemahaman keagamaan, pendidikan dan lain-lain berdasarkan ukuran dalam masyarakat (Wawancara dengan Abdul Halid Tamal, 20 Oktober 2016). Selain itu, kondisi tersebut juga mencerminkan tingkat keagamaan, keteladanan, perilaku dan kebesaran serta kesuksesan sang mayat yang dilihat dari banyaknya orang yang datang melayat dan ikut mensukseskan *pattumateang*.

* 1. **Kehidupan Sosial, Budaya dan Politik di Wilayah Kerajaan Arungkeke Dewasa Ini**

Kehidupan masyarakat di manapun di muka bumi ini, baik dilihat dari segi kesederhanaan maupun dilihat dari kompleksitas masyarakat tersebut selalu memiliki aturan-aturan tertentu. Baik peraturan yang hanya berlaku untuk lingkungan internal dan berlaku hanya untuk kalangan sendiri, maupun peraturan yang berlaku secara umum untuk segenap anggota masyarakat secara keseluruhan. Maka dengan demikian aturan dalam masyarakat sangat diperlukan untuk mampu menjaga keharmonisan di antara anggota masyarakatnya.

Sehingga mau tidak mau setiap anggota masyarakat dituntut untuk memiliki kesanggupan bekerjasama. Adanya kerjasama dan interaksi secara tertentu, serta berkualitas terhadap aktifitas yang mereka lakukan, kemudian bermanfaat terhadap anggota lainnya, maka akan dapat menjadi suatu sistem sosial budaya masyarakat (Soeprapto, 1996. 31). Letak geografis seperti itu memungkinkan dikembangkannya sistem mata pencaharian hidup berupa pertanian ladang, nelayan di samping tambak dan ladang penggaraman. Jenis aktifitas yang banyak dikembangkan, yaitu aktifitas dalam bidang pertanian, baik pertanian kawasan darat maupun pertanian kawasan pantai. Pertanian kawasan darat berlangsung pada musim hujan dengan menghasilkan produksi seperti padi, jagung, kacang-kacangan, umbi-umbian, buah-buahan, sayur-sayuran dan hasil tanaman lainnya. Sementara pertanian kawasan pantai dikenal tiga jenis pertanian, yaitu petani nelayan (penangkap ikan laut), petani penggarap empang (budidaya ikan, udang dan penggaraman, serta sekarang dikenal budidaya rumput laut) dan yang ketiga adalah petani yang disebut pelayar/ pedagang (Hammado Tantu, 1988: 279).

Selain itu Arungkeke memiliki pelabuhan yang teduh dan aman, baik dari pengaruh gelombang laut muson barat maupun jaminan keamanan pada saat transaksi barang, termasuk terhindar dari pengacau, pencurian dan perampokan. Pelabuhan Arungkeke pada saat itu, juga dijadikan sebagai tempat berlabuhnya berbagai perahu dan kapal dagang dari berbagai daerah. Yang menarik pula di sekitar pelabuhan pantai, karena tempat ini begitu dekat dengan laut tetapi air tawar sangat mudah diperoleh dan ini masih terlihat sampai sekarang (Bougas, 2004: 20).

Pada tahun 1952 pemerintah gabungan Selebes Selatan dibubarkan dengan peraturan pemerintah pusat pada tanggal 12 Agustus 1952 No. 34. Sekaligus mengubah daerah-daerah Kerajaan Gowa menjadi daerah Swatantra Tingkat II sebelum kabupaten digunakan. Daerah swatantra ini bersifat otonom berdasarkan Undang-undang NIT 1950 No. 44. Setingkat dengan daerah kabupaten Swatantra Tingkat II, menurut Undang-undang 1948 No.22 ciptaan Republik Yogyakarta. Kabupaten Makassar yang meliputi *onder afdeeling-onder afdeeling* lama, yaitu: Gowa, Takalar, Jeneponto, Maros dan Pangkajene (Bougas, 2004: 23).

Sejak tahun 1961 daerah Arungkeke berada di bawah naungan distrik Arungkeke/ Batang, yang terdiri dari beberapa wilayah seperti Wilayah Arungkeke dan Tarowang masuk di dalamnya. Selanjutnya pada tahun 1965 berdasarkan Undang-Undang No. 9 tahun 1965 tentang pokok-pokok pemerintahan desa praja. Maka pemerintahan wilayah Arungkeke dan beberapa wilayah lainnya masing-masing diberi nama bori. Kemudian dari pemerintahan Bori Arungkeke dimekarkan menjadi beberapa pemerintahan wilayah *gallarrang* antara lain: Gallarrang Petang, Gallarrang Tamanroya, Gallarrang Pallengu, Gallarrang Lassang-lassang, Gallarrang Tunrungganrang, Gallarrang Boronglamu, Gallarrang Alla-alla, Gallarrang Bontorappo, dan Gallarrang Bungeng (Wawancara dengan S. Karaeng Tika, 12 Oktober 2016).

Kondisi tersebut memunculkan berbagai persoalan, termasuk syarat adat-adat desa tidak boleh dihilangkan begitu saja tetapi harus tetap dipertahankan dan dilestarikan. Terutama kepala kelurahan harus bangsawan yang berasal dari Arungkeke sendiri. Sebab menurut keterangan lain bahwa orang Arungkeke khususnya para bangsawan (para karaeng) tidak mau diperintah oleh orang luar Arungkeke apa lagi bukan golongan *karaeng*. Syarat inilah yang belum bisa di penuhi oleh pemerintah daerah Kabupaten Jeneponto (Surat Pernyataan kepala Desa Arungkeke, Drs. Sultan Karaeng Duppa, 10, Mei, 1997).

Kecamatan Arungkeke yang pada saat itu masih berstatus *Gemenschap*, jumlah penduduk hasil cacah jiwa tahun 1944, tersebut adalah sebagai berikut: Binamu 112. 456 orang, Bangkala 23. 616 orang, Arungkeke 6. 173 orang dan Tarowang 5. 471 orang. Selanjutnya cacah jiwa yang dilakukan pada tahun 1974, setelah status Jeneponto menjadi sebuah Kabupaten berjumlah sebanyak 213. 329 orang yang tersebar di lima Kecamatan masing-masing sebagai berikut: Kecamatan Binamu 47.438 orang, Kecamatan Bangkala 42.173 orang, Kecamatan Tamalatea 48.126 orang, Kecamatan Batang 38.323 orang dan Kecamatan Kelara 37.224 orang. (Sahajuddin, 2008: 57).

Arungkeke dalam hal ini sudah masuk melebur di Kecamatan Batang bersama dengan Tarowang. Melihat komposisi penduduk Kecamatan Batang pada masa berstatus *Gemenschap* sebanyak kurang lebih 38. 323 orang yang kemudian pada selang waktu kurang lebih tiga puluh enam tahun (36 thn) yakni sampai pada tahun 1980, penduduk yang mendiami Kecamatan Batang sudah mencapai 42. 173 orang. Ini berarti bahwa ada peningkatan pertumbuhan penduduk yang cukup besar, yaitu bertambah sekitar 3.850 orang atau rata-rata bertambah 106, 95 orang pertahun. Dan kalau diprosentasekan pertambahannya mencapai 38,5%. Pertambahan ini pada tahun itu dianggap pertambahan penduduk yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan daerah lainnya di Jeneponto.

Demikian juga halnya di daerah-daerah lainnya yang juga mengalami perubahan atau peningkatan jumlah penduduk. Bahkan terlihat, bahwa pertambahan penduduk tersebut bersamaan dengan pertambahan atau perubahan-perubahan daerah secara administrasi. Maksudnya bahwa perubahan itu sejalan dengan perubahan sistem pemerintahan yaitu berubahnya menjadi Kabupaten dengan jumlah kecamatan sebanyak lima buah. Khusus untuk Kecamatan Batang terdiri dari 12 buah desa dengan jumlah penduduk 48. 307 orang pada tahun 1980. Dari 12 desa di Kecamatan Batang, Arungkeke tercatat paling tinggi jumlah penduduknya tetapi sebanding dengan luas wilayahnya. Arungkeke sebelum dimekarkan menjadi beberapa desa adalah wilayah yang sangat luas di Kecamatan Batang (Sahajuddin, 2008: 57-58).

Selanjutnya pasca Arungkeke sudah berada pada Kecamatan Batang, pertambahan penduduknya semakin meningkat. Demikian juga perubahan-perubahan penduduk khusus di Desa Arungkeke, yakni kurang lebih 4, 478 orang sampai pada tahun 1980 seperti yang tercatat pada data penduduk Desa Arungkeke (Sahajuddin, 2008: 58).

Sementara dalam bidang pertanian, sejak lama penduduk di daerah ini telah mengenal sistem pertanian, terutama penanaman padi di sawah dan penggaraman di empang. Oleh karena itu pertanian merupakan mata pencaharian pokok masyarakatnya. Di samping itu banyak juga melakukan aktivitas kehidupan di laut, baik sebagai nelayan maupun sebagai pelaut yang menggunakan perahu-perahu tradisional. Perubahan status kepemilikan tanah mulai berubah ketika sistem kerajaan sudah mulai menurun, apa lagi ketika Belanda melakukan penetrasi politik, sosial ekonomi dan budaya. Kemudian perubahan diteruskan pada masa pendudukan Jepang.

Suatu Masyarakat pedesaan yang tenang dan damai karena didukung oleh keteraturan hidup yang ada di dalamnya. Keteraturan itu sendiri harus didukung oleh pemerintahan yang bijaksana, norma-norma yang beretika serta nilai-nilai kepercayaan yang universal. Kepercayaan masyarakat Arungkeke pada umumnya dilihat pada sisi agamanya dapat dipastikan bahwa pada umumnya menganut agama Islam. Sementara Arungkeke sendiri pada masa awal perkembangan agama Islam di Sulawesi Selatan dijadikan sebagai pusat syiar dan perkembangan agama Islam khususnya di Jeneponto. Hal ini terlihat jelas dengan berdirinya kelompok kajian Islam (pesantren) yang dimotori para ulama/ Kyai. Perkembangan selanjutnya didirikanlah pesantren di Jeneponto yang berlokasi di Arungkeke sejak beberapa puluh tahun yang lalu dan masih eksis sampai sekarang.

**Kesimpulan**

1. Kerajaan Arungkeke sejak awal berdirinya merupakan kerajaan yang otonom, bukan merupakan kerajaan bawahan dari kerajaan lain. Walaupun dalam perkembangan selanjutnya kerajaan ini bergabung dan menjadi bagian dari Kerajaan Binamu.
2. konflik dan integrasi sosial budaya dan politik di kerajaan Arungkeke, lahirnya perbedaan golongan dalam masyarakat pada dasarnya diawali oleh adanya naluri manusia untuk saling menguasai.
3. Kehidupan sosial, budaya dan politik di wilayah kerajaan Arungkeke secara umum sering terjadi suatu peristiwa konfik dengan berbagai persoalannya. Arungkeke merupakan salah satu desa di Jeneponto, daerah ini dikenal sebagai desa yang memiliki potensi kehidupan dalam berbagai macam aktifitas yaitu aktifitas dalam bidang pertanian, baik pertanian kawasan darat maupun kawasan pantai. Disamping itu banyak juga melakukan aktifitas kehidupan di laut, baik sebagai nelayan maupun sebagai pelaut yang menggunakan perahu-perahu tradisional.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abdullah, Taufik. 1985. *Ilmu Sejarah dan Histografi*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Abd. Razak Daeng Patunru, 1993, *Sejarah Gowa*, Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan Makassar

Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*  (Cet.X). Bandung : Alma’arif,t.th

Anhar Gonggong, 1986, “Sulawesi Selatan dan Komunikasi: Dalam Rangka Proses Integrasi Bangsa”, dalam buku Muhklis (Editor), 1986, *Dinamikan Bugis Makassar*, Sinar Krida, Makassar

Amir, 2010. *Sejarah Arungkeke Jeneponto* (online), (hhtp;//ww. Kompasiana.com/amir/sejarah rung-keke-jeneponto-sul-sel, diakses 01juni 2016)

Arifin, H.M,2000. *Kapita Selekat Pendidikan Islam dan umum*..Jakarta : Bumi Aksa.

Arifin, H.M,1994. *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara

Bungin, 2008*.Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta : Kencana.

CaldwellW. Bougas The early history of Binamu and Bangkala, South Sulawesi In: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 160 (2004), no: 4, Leiden, 456-510 This PDF-file was downloaded from (<http://www.kitlv-journals.nl>, hlm. 20-21, Diakses 01 Juni 2016)

Caldwell dan Bouges, 2004. *Budaya Organisasi dan Budaya Kontra* : Jilid I-II. Jakarta : Aneka Cipta.

Campbell, Tom. 1994. *Tujuh Teori Sosial: Sketsa, Penilaian, Perbandingan*, Yogyakarta, Kanisius

C.S.T. Kansil, 1988, *Desa Kita Dalam Peraturan Tata Pemerintahan Desa*, Jakarta, Ghalia Indonesia,

Edward L. Poelinggomang, makalah seminar Hari Jadi Kabupaten Jeneponto yang berjudul “Dari Binamu ke Jeneponto” yang diselenggarakan di Jeneponto pada tanggal 21 Agustus 2002

George Ritzer dan Douglas J. Goodman, 2010. *Teori Sosiologi Modern,* Jakarta. Prenada Media

Gottschalk, Louis. 1985. *Mengerti Sejarah* (Terjemahan Nugroho Notosusanto). Jakarta : Yayasan Penerbit UI.

Guru Sejarah, 2013*. Kerajaan Arungkeke di Jeneponto*. Sejarah Lokal:Motivator pendidikan, (*Online*), (http//www.gurusejarah.com/2013/04/Kerajaan-Arungkeke-di Jeneponto. Html, Diakses 01 Juni 2016)

Hadrawi, Muhlis. 2008. *Nuansa Sejarah Kerajaan Kuno Jeneponto*, Jakarta: Ininnawa

Hamid Abdullah,1985. *Manusia Bugis Makassar* : Suatu Tinjauan Historis Terhadap Pola Tingkah Laku dan Pandangan Hidup Manusia Bugis Makassar. Jakarta : Inti Idayu press.

Husain Saidong, Upacara Tradisional Pattumateang (Attumate) Pada Masyarakat Turatea, Kab. Jeneponto, Makassar, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional

Hamid, Pananrangi. 1985. “Petani Garam di Nasara”, Makassar, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Ujung Pandang

Hammado Tantu, “*Pegaram dan Kehidupannya, Studi Kasus Pada masyarakat Benteng dan Bontorannu di Kabupaten Jeneponto*”, dalam Mukhlis Paeni (editor), 1988, *Dimensi Sosial Kawasan Pantai*, Makassar, P3MP, untuk The Toyota Foundation Jepang, Indonesia

Ishak, Muhammad,1998. *Komplesks Makam Kuno Tabbaka Desa Arungkeke, kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto*. Skripsi Jurusan Arkeologi Ujung Pandang, Universitas Hasanuddin.

Katalog BPS: 7304041.0201, statistik tahunan, Kecamatan Arungkeke Dalam Angka 2015, Badan Busat Statistik Kabupaten Jeneponto

Kartodirjo, Sartono. 1993. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodelogi Sejarah*-Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Koentjaraningrat, 1990, Pengantar Ilmu Antropologi, Jakarta, PT. Rineka Cipta Kuntowijoyo, 1994, *Metodologi Sejarah*, Tiara Wacana dan Jurusan Sejarah Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

----------------. 2003. *Metodelogi Sejarah*. Yogyakarta : Tiara Wacana Moleong. J,

Louis Cottschalk, 1982, (penerjemah Nugroho Notosusuanto), *Mengerti sejarah*, Universitas Indonesia Press Jakarta

Mattulada, 1998, *Sejarah, Masyarakat dan Kebudayaan Sulawesi Selatan,* Hasanuddin University Press. Makassar

Notosusanto, Nugroho. 1971. *Norma-norma Dasar Penelitiaan dan Penulisan Sajarah*. Jakarta : Dephamkam.

----------------, 1978, Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer, Idayu, Jakarta

Patunru daeng, Abd. Razak. 1993, *Sejarah Gowa*, Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan Makassar

Piotr Sztompka*, Sosiologi Perubahan Sosial*, diterjemahkan oleh Alimandan dengan editor Tri Wibowo Budi santoso, Perdana Media, Jakarta

Poelinggomang, Edward. L. 2002. *Dari Turatea ke Jeneponto,* Jeneponto : Makalah Seminar tidak ditertibkan.

Ramayulis. 2001. *Metologi Pengajaran Agama Islam* (Cet III). Jakarta Kalam Mulya.

Sadikin, Muhammad, 2013. *Teori Konflik Sosial*. Resume Buku Teori Konflik Sosial Bab 6. Kalimantan Barat. Jurusan Ilmu pemerintahan.

Sahajuddin, 2008. *Kehidipan Sosial Petani Garam di Arungkeke Dalam Perspektif Sejarah* 1950-1985. Hal.1:2. Tesis Fakultas Sastra, Universitas Hasanuddin

Sartono Kartodirdjo, 1985. *Pemikiran dan Perkembangan Historigrafi Indonesia: Suatu Alternatif*, Gramedia, Jakarta

Sartono Kartodirdjo, 1992, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, Gramedia Jakarta

Sartono Kartodirdjo*,*1988*, Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 Dari Emporium Sampai Imperium,* jilid I, Jakarta, PT. Gramedia

Sahajuddin, 2009, (laporan penelitian) *”Bantaeng Pada Masa Kolonial Belanda Periode 1905-1942”*, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Makassar

Saidong, Husain, Husain, 2001. *Upacara Tradisional Pattumateang (Attumate) Pada Masyarakat Turatea, Kab. Jeneponto,* Makassar, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Makassar

Soeprapto, 1996, *Sosiologi Suatu Pengenalan Ringkas*, Yayasan Widya Patria, Yogyakarta

Tjandrasasmita, Uka. 1988. *Himpunan peraturan-Peraturan Perlindungan Cagar Budaya Nasional*. Jakarta : Departemen Pendidikan dan kebudayaan, Dirjen Kebudayaan Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala.

Tompo. 2001. *Tiga Ungkapan Sejarah Turatea, Jeneponto* : Pemda jeneponto